

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

E-Budgeting Mulai Disoal

Carut Marut Penyusunan APBD 2020

JAKARTA - Perihal polemik anggaran yang terjadi di Pemprov DKI dianggap tidak bisa menyalahkan sistem e-budgeting yang sudah berjalan. Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi perlu adanya tim gubernur yang kuat untuk memantau anggaran. "Dengan sistem yang sekarang saja sudah berjalan saja begini, bagaimana dengan sistem anggaran yang buruk," ujar Koordinator ICW Donald Fariz, Senin (4/11/2019).

Donal menambahkan, tidak bisa seluruhnya disalahkan kepada sistem e-budgeting. Karena sebenarnya ada dua variabel di dalamnya, yakni sistem dan orang yang menjalankannya. "Karena sistem itu dibangun dengan sistem elektronik yah," kata dia.

Terkait dengan mundurnya dua pejabat, kata dia, merupakan respon internal Pemprov DKI Jakarta atas kesalahan atau kelalaian menyusun rancangan anggaran APBD 2020. "Sam-pai sekarang memang belum ada penjelasan kenapa mereka mundur. Tapi itu sebagai respon internal Pemprov atas kesalahan atau kelalaian RAPBD," tutur dia.

Donal menambahkan, adanya pembentukan tim yang kuat untuk mengawasi anggaran itu harus dilakukan. Karena tim itu yang akan bekerja membantu gubernur untuk mengawasi banyaknya anggaran. "Kan ada tim TGUPP tuh, kenapa tidak diperdayakan," ucap Donald.

Ia menyarankan, Pemprov DKI untuk bisa memperhatikan rekam jejak pengganti dia pejabat yang mundur. Karena kata dia, dua pejabat itu harus memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi. "Dua hal itu yang harus diperhatikan untuk mencari penggantinya," jelas dia.

Di sisi lain, sistem e-budgeting di lingkungan Pemprov DKI mulai dipertanyakan realisasinya. Pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai, seharusnya sistem itu sudah menjadi sebuah peraturan daerah (perda) dan melekat

untuk dijalankan oleh siapapun kepala daerah yang terpilih.

"Apa kabar ebudgeting,? Semestinya sistem itu sudah menjadi perda. Artinya siapa-pun yang menjadi kepala daerah sudah melekat dan harus merealisasikan," kata Pengamat LIPI Siti Zuhro, Senin (4/11/2019).

Siti menambahkan, dengan dibentuknya sebagai perda maka e-budgeting itu seperti sudah dilembagakan. Selama ini, sistem itu sudah menganut transparansi. Sehingga, bila sudah memiliki kekuatan hukum maka kuat untuk dijalankan. "Selama ini yang koar-koar hanya zamannya Ahok, dan itu jalan," kata dia.

Apalagi polemik anggaran di Pemprov DKI, kata Siti, sudah menjadi gunjingan. Ditambah mundurnya dua orang pejabat ketika masalah anggaran sedang ramai dibahas. Menurut dia, mundurnya mereka patut menjadi pertanyaan. "Mundurnya dua pejabat itu menjadi pertanyaan publik tentunya," ucap dia.

Terkait adanya keinginan kelompok atau seseorang untuk Anies mundur, Siti mengaku, maka masalah ini masuk ke ranah kepentingan politik. Meski mau tidak mau sudah tersusupi kepentingan, tapi apa harus endingnya Anies mundur. "Bukan itu endingnya, kecuali kalau terindikasi ada kepentingan Anies," tandas dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menduga, dugaan mundurnya dua pejabat itu karena ada tekanan. Dia menilai, atas kejadian ini sangat disayangkan karena di tengah pembahasan anggaran. "Kenapa tidak menyelesaikan perperangan dulu baru mundur," kata dia, Senin (4/11).

Bahkan ada kemungkinan, sambung Gembong, pengunduran diri dua pejabat tersebut tak lepas dari tekanan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Tapi kami tetap hormati keputusan untuk mundur itu," tambah dia.

Sementara itu, pantauan di gedung DPRD DKI, rapat anggaran masih berjalan di komisi D pada Senin (4/11). Dalam pembahasan itu menyangkut pemaparan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengenai kegiatan Community Action Plan (CAP).

Anggota Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, ada anggaran yang menjadi pertimbangan terlalu besar, yakni satu RW (Rukun Warga) mendapat jatah anggaran mencapai Rp600 juta. Padahal di 2019, anggaran berkisar Rp400 juta per RW.

"Kami minta ditunda dulu, nanti akan dipaparkan ulang. Seperti apa yang bagus dan efektif, akuntabel. Karena kan regulasi RW itu ada yang padat ada juga yang renggang," pungkas dia.

Sarat Berbagai Kepentingan

Pengamat Ekonomi Agustinus Jeneo menuturkan, anggaran DKI di tahun 2020 akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena adanya mata anggaran yang irasional. Hal ini, kata dia, membuat masyarakat menilai bahwa dalam proses penyusunannya syarat dengan berbagai kepentingan. "Penyusunan anggaran seperti ini jelas merugikan masyarakat," tutur dia kepada INDOPOS, Senin (4/11/2019).

Ambil contoh, lanjut Jeneo, anggaran Lem Aibon yang nilainya sangat fantastis, yaitu Rp 82 miliar. Walaupun anggarannya direvisi, tetap saja publik menilai bahwa Pemprov DKI jelas-jelas melakukan mark up anggaran.

Harusnya, kata dia, Pemprov DKI dalam menyusun anggaran 2020 berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga slogan Pak Anies Baswedan "Maju Kotanya, Sejahtera Masyarakatnya" bisa terwujud.

Terkait dengan kesalahan input di e-budgeting, Jeneo menilai, SKPD di Pemprov DKI kurang teliti dan tidak profesional. "Untuk persoalan salah input ini Pak Anies harusnya melakukan

evaluasi menyeluruh atas semua anggaran yang diinput oleh SKPD di Pemda DKI," urai dia.

Sebelumnya diberitakan, menjelang pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2020, Gubernur DKI, Anies mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih teliti dalam menyusun anggaran agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Pemrov DKI bersama DPRD DKI Jakarta saat ini sedang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI 2020.

Untuk itu, Anies Baswedan memerintahkan anak buahnya di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Adapun perintah tersebut, bertujuan agar tidak ada anggaran ganda pada APBD 2020. "Tadi itu lebih pada perintah untuk menyisir ulang semua anggaran agar tidak muncul, satu, duplikasi," imbuh Anies saat di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019) lalu.

Anies memberi contoh, misalnya SKPD menganggarkan pembelian tinta pada 2020 hal tersebut juga dialokasikan pada 2019. Padahal, tinta yang dibeli menggunakan anggaran 2019 belum habis. "Alat-alat itu belum habis, jangan belanja lagi. Kalau alat habis memang harus belanja, tapi harus dicek statusnya seperti apa," ulas Anies.

Selain itu, kegiatan pembangunan di Jakarta pun tak luput dari pandangan Anies untuk dapat dikaji ulang. "Kegiatan pembangunan, kami menggunakan bahan alat material dari mana. Kami milih material dari lokal. Lokal itu maksudnya daerah Jakarta atau luar Jakarta, menggunakan tukang atau pabrik, itu semua supaya di-review," tutur dia. APBD DKI Jakarta 2020 harus sudah disahkan paling lambat diakhir November 2019 ini. (dny/ibl)